



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. maka Stasiun KIPM Palembang ikut mewujudkan misi BPPMHKP yaitu :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi Sertifikasi, Surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan
3. Mewujudkan system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Palembang untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan pengendalian mutu dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.



Palembang, 3 Februari 2025
Kepala SKIPM Palembang

Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi. M.Pi
Nip. 19740225 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	iii
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan.....	2
I.3 Sasaran.....	2
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	3
2.1 Visi dan Misi.....	3
2.2 Tujuan Strategis.....	4
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi.....	4
2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	5
2.4.1 Sasaran Strategis.....	5
2.4.2 Indikator Kinerja.....	7
2.4.3 Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Palembang.....	9
BAB III PENUTUP.....	13

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Palembang perjenis Kegiatan.....	10
Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun KIPM Palembang per kegiatan dan per jenis belanja.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Arah kebijakan umum pengawasan nasional Tahun 2025-2029 tercantum pada beberapa misi Presiden RI Tahun 2025-2029 dalam mencapai visi Presiden RI Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden Atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

KKP sebagai organisasi yang membantu Presiden RI pada bidang kelautan dan perikanan, menetapkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2025-2029 sebagai visi dan misi KKP Tahun 2025-2029. Implementasi atas visi dan misi tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat dan memberi manfaat serta menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

BPPMHKP sebagai bagian integral dari KKP sebagai unit Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP memiliki mandat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang KP agar sesuai dengan rencana dan tujuan serta sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*). Dengan peran strategis tersebut, BPPMHKP dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu secara profesional dan berkualitas.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran BPPMHKP tahun 2025 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Palembang pada tahun 2025.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan BPPMHKP adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palembang Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM BPPMHKP tahun 2025-2029 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun SKIPM Palembang pada tahun 2025.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu, Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan BPPMHKP adalah Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. serta menetapkan misi:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.

3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

2.2 Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas program prioritas BPPMHKP (Balai Besar Pengawasan Mutu dan Kesehatan Ikan) meliputi:

- Menjamin mutu produk perikanan
- Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
- Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, dan mandiri

BPPMHKP menjalankan program-program tersebut dengan:

- Penerapan sistem sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pengawasan dan pengendalian mutu dan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
- Pengawasan dan pengendalian sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
- Tata kelola pemerintahan yang baik

BPPMHKP juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk makan ikan sehat dan bermutu.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian. Tujuannya adalah menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program- program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan

prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BPPMHKP dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2025-2029, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029 sebagai berikut:

Visi dan misi BPPMHKP (Badan Pengawas Mutu, Kelautan dan Perikanan) tahun 2025 adalah:

- Mengedepankan kolaborasi dan sinergi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan
- Meningkatkan produksi Pangan Biru sebagai sumber protein penting
- Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
- Menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas
- Menjamin mutu hasil kelautan dan perikanan
- Menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu serta hasil kelautan dan perikanan

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.4.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BPPMHKP tersebut dibagi dalam tiga perspektif antara lain :

1. Kegiatan Pengendalian Mutu yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif , dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)
 - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang

- memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)
- c. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)
 - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (nama UPT yang memiliki lalu lintas ekspor)
2. Kegiatan Standardisasi Sistem Kepatuhan yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)
 - b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)
 3. Kegiatan Dukungan manajemen internal Lingkup BPPMHKP, dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)
 - b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup
 - c. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)
 - d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)
 - e. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)
 - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)
 - g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)
 - h. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)
 - i. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

2.4.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2025. Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja UPT berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja SKIPM Palembang tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (nama UPT yang memiliki lalu lintas ekspor)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75

SK.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	88

Dalam mewujudkan target indikator Kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Kinerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu
2. Manajemen Mutu
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan Pengendalian Mutu diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan

mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan di atas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan Standar-disasi Sistem dan Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit Kinerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4.3 Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Palembang

Rencana Kinerja dan anggaran Stasiun KIPM Palembang tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target-target Kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana Kinerja Stasiun KIPM Palembang dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Stasiun KIPM Palembang pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.5,762,767,000,-

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Palembang tahun 2025 untuk mewujudkan target-target Kinerja tersebut diantaranya dengan

mereviu kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut:

Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun KIPM Palembang per jenis KRO



Total rencana alokasi anggaran Stasiun KIPM Palembang pada tahun 2025 sebesar Rp.5,762,767,000,- Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP Rp.5.432.767.000.atau sebesar 94,27 %
2. Manajemen Mutu Rp.145.000.000 atau sebesar 2,52 %
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Rp.185.000.000 atau sebesar 3,21 %

Sedangkan rincian masing-masing kegiatan dituangkan dalam Rincian Output (RO) kegiatan pada Stasiun KIPM Palembang, terdiri dari :

1. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor inpor-nya Rp.5.000.000
2. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi Rp.50.000.000
3. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi

Rp.95.000.000

4. Hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya Rp.25.000.000
5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.10.000.000
6. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.3.000.000
7. Bimbingan Teknis Peningkatan system jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan Rp.8.500.000
8. Rekomendasi kebijakan Parameter uji terakreditasi di laboraotrium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan Rp.60.000.000
9. Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu Rp.25.000.000
10. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium Rp.40.000.000
11. Unit/Usaha perikanan yang menerpkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi Rp.8.500.000
12. Layanan Umum Rp.103.240.000
13. Layanan Perkantoran Rp.3.457.718.000
14. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp.1.798.569.000
15. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Rp.52.944.000
16. Layanan Manajemen Keuangan Rp.20.296.000

Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun KIPM Palembang per jenis belanja



Total rencana alokasi anggaran Stasiun KIPM Palembang pada tahun 2025 sebesar Rp.5.762.767.000,-. Alokasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.457.718.000,- atau sebesar 60 %
2. Belanja Barang sebesar Rp.2.305.049.000,- atau sebesar 40 %

BAB III PENUTUP

Program Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2025 pada Stasiun KIPM Palembang diimplementasikan dalam rangka penerapan Kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara professional dan partisipatif.
7. Terwujudnya aparatur sipil negara pada Stasiun KIPM Palembang yang kompeten, profesional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan pada Stasiun KIPM Palembang yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) pada Stasiun KIPM Palembang secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran Stasiun KIPM Palembang pada tahun 2025 sebesar Rp. 5.762.767.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.457.718.000,- atau sebesar 60 %
2. Belanja Barang sebesar Rp.2.305.049.000,- atau sebesar 40 %

Sedangkan rincian alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP Rp.5.432.767.000.atau sebesar 94,27%

2. Manajemen Mutu Rp.145.000.000 atau sebesar 2,52 %
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Rp.185.000.000 atau sebesar 3,21 %

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terdapat keselarasan. Serta pencapaian hasil kegiatan Stasiun KIPM Palembang dapat terlaksana dengan sangat baik.